

KAJIAN YURIDIS FUNGSI *SECURITY COUNCIL* PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA NEGARA DIDUNIA (STUDY KASUS DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA)

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

Rohid Prayoga

2110012111073

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

Reg No. : 05/SKRIPSI/II/FH/VIII-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY
Reg No : 05/SKRIPSI/HH/FH/VIII-2025

Nama : Rohid Prayoga
Npm : 2110012111073
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Fungsi Security Council PBB
Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Negara
Didunia (Study Kasus Dalam Penyelesaian Konflik
Antara Rusia Dan Ukraina)

Telah dikonsulkan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dwi Astuti Palupi, S.H., M. Hum. (Pembimbing)



**A LEGAL STUDY OF THE FUNCTION OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL IN
RESOLVING CONFLICTS BETWEEN COUNTRIES (A CASE STUDY OF THE CONFLICT
RESOLUTION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE)**

Rohid Prayoga¹, Dwi Astuti Palupi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Rohidprayoga17@gmail.com

ABSTRACT

With the growing demand for long-term institutions trusted to resolve various issues in international relations, international organizations began to develop rapidly in the 19th century. The United Nations (UN) has a primary mission of maintaining world peace and security. To achieve this mission, the UN is mandated to assist countries facing conflict, especially when those countries are unable to resolve their problems on their own. The Russia-Ukraine conflict, which began in 2014 and escalated in 2022, has attracted global attention and had a significant impact at the international level. In this regard, the role of the United Nations (UN) is crucial in understanding how this organization attempts to resolve disputes between two sovereign states. The type of research used by the author is normative legal research. After data has been collected comprehensively from various sources, such as libraries, literature, media, the internet, and other valid sources, data analysis is carried out by compiling and processing the data to obtain conclusions. The Security Council's primary function is to maintain international peace and security. The Council serves as a platform for rapid decision-making in crisis situations such as civil war, international terrorism, the proliferation of weapons of mass destruction, and transnational aggression. In dealing with the conflict between Russia and Ukraine, the UN Security Council can only act as a mediator because Russia, as a member of the Security Council, has veto power, which allows Russia to reject decisions taken by the Security Council.

Keywords: *Security Council, United Nations, Conflict Between Russia and Ukraine*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan institusi jangka panjang yang dipercaya untuk menyelesaikan beragam permasalahan dalam hubungan internasional, organisasi internasional mulai berkembang pesat pada abad ke-19. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki misi utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Untuk mencapai misi ini, PBB diberi mandat untuk membantu negara-negara yang menghadapi konflik, terutama ketika negara tersebut tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.¹

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki misi utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Untuk mencapai misi ini, PBB diberi mandat untuk membantu negara-negara yang menghadapi konflik, terutama ketika negara tersebut tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. PBB aktif berperan dalam penyelesaian konflik internasional dengan berbagai pendekatan, termasuk diplomasi, misi penjaga perdamaian (*peacekeeping*), dan mediasi antara pihak-pihak yang berseteru. Melalui tindakan kolektif dari negara-negara anggotanya, PBB telah berhasil membantu penyelesaian banyak konflik, baik dalam skala besar maupun

¹Malcolm N.Shaw, 2013, *Hukum Internasional*,

diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media, hal. 271.

kecil.²

Konflik Rusia-Ukraina, yang dimulai pada 2014 dan semakin memanas pada 2022, telah menarik perhatian dunia dan memberikan dampak besar di tingkat internasional. Dalam hal ini, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat penting untuk memahami bagaimana organisasi ini berusaha menyelesaikan perselisihan antara dua negara berdaulat. Sebagai badan yang didirikan untuk menjaga perdamaian dan keamanan global, PBB memainkan peran kunci dalam memfasilitasi dialog, mediasi, serta intervensi dalam menghadapi konflik.³

Konflik ini tidak hanya mempengaruhi hubungan langsung antara Rusia dan Ukraina, tetapi juga berdampak pada stabilitas kawasan Eropa dan dinamika hubungan internasional secara keseluruhan. PBB telah mengambil berbagai langkah, termasuk mengeluarkan resolusi security council dan melaksanakan misi pengamatan, dengan tujuan untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai. Namun, PBB menghadapi tantangan besar dalam penyelesaian konflik ini, terutama karena adanya penolakan dari anggota tetap security council dan perbedaan kepentingan politik di antara negara-negara anggota. Selain itu, ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat di lapangan, termasuk Rusia dan Ukraina, semakin menyulitkan proses mediasi dan pencapaian solusi damai.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peran PBB dalam menyelesaikan konflik antara negara Rusia dan Ukraina ini. Oleh sebab itu penulis ingin mengulas lebih dalam lagi mengenai **“KAJIAN YURIDIS FUNGSI SECURITY COUNCIL PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA NEGARA DIDUNIA (STUDY KASUS DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA)”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana fungsi Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik internasional

yang diatur dalam Piagam PBB serta bagaimana peran yang diambil Dewan Keamanan PBB dalam mencari penyelesaian konflik Rusia-Ukraina yang sesuai dengan hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Memahami Bagaimana Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Internasional yang diatur dalam Piagam PBB. Dan Peran Yang Diambil Dewan Keamanan PBB dalam mencari penyelesaian konflik Rusia-Ukraina sesuai dengan norma hukum internasional.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang dan jenis penelitian, penelitian pada proposal ini dapat digolongkan kedalam penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, dan teori-teori hukum.⁴ Penelitian normatif hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga huku yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Internasional Yang Diatur Dalam Piagam PBB (BAB VI Dan VII)

Pada Bab VII Piagam PBB memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi.⁴ Implementasi Bab VII mengalami hambatan struktural karena posisi Rusia sebagai anggota

² F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.127

³ Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes.(2003), *Pengantar Hukum Internattonal*. Bandung : Pusat Studi Wawasan Nusantara, PT. Alumni,. hal. 101.

⁴ Ambarwati, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

tetap DK PBB yang memiliki hak veto. Rusia secara konsisten menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi-resolusi yang diarahkan padanya.⁵

Cara PBB menangani hak veto Rusia merupakan tantangan yang kompleks. Seperti memerintahkan Rusia untuk tunduk pada Piagam PBB yang berisi larangan negara anggota melanggar kedaulatan wilayah negara lain dengan memakai kekuatan pasukan, mengecam Rusia agar menarik pasukan dari Ukraina hingga pemberian sanksi internasional berupa pencabutan keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sanksi atas kekejaman Rusia terhadap Ukraina.⁶

Pada 4 Maret 2022, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan sebuah resolusi penting yang membahas konflik antara Rusia dan Ukraina. Resolusi tersebut memuat poin utama, antara lain⁷ :

(1) menuntut Rusia untuk segera dan tanpa syarat menarik seluruh pasukannya dari wilayah Ukraina yang diakui secara internasional. (2) Selain itu, resolusi ini juga menuntut pencabutan keputusan Rusia terkait status wilayah Donetsk dan Luhansk yang kontroversial. (3) PBB juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah, sekolah, dan rumah sakit, serta korban sipil yang terus berjatuh, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

B. Peran dan Fungsi Dewan Keamanan PBB Untuk Mencari Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Yang Sesuai Dengan Hukum Internasional

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memiliki peran penting dalam mencari penyelesaian konflik

Rusia-Ukraina yang sesuai dengan hukum internasional. Sebagai organ utama PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia, DK PBB berupaya mendorong penyelesaian damai melalui resolusi dan diplomasi, meski menghadapi kendala seperti hak veto Rusia yang menghambat pengambilan keputusan tegas. Misalnya, pada 24 Februari 2025, DK PBB mengadopsi resolusi yang mengambil posisi netral dan menyerukan diakhirinya konflik serta perdamaian yang berkelanjutan tanpa menyalahkan pihak tertentu, sebagai langkah awal menuju perdamaian di masa depan.⁸

Selain itu, DK PBB juga memiliki fungsi untuk menetapkan sanksi dan mengizinkan tindakan lebih tegas jika diperlukan, seperti penggunaan kekuatan militer, sesuai dengan Piagam PBB Bab VII. Namun, dalam kasus konflik Rusia-Ukraina, veto Rusia sering kali menghalangi langkah-langkah tersebut sehingga DK PBB lebih banyak berperan dalam mediasi dan mendorong dialog antar pihak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- 1) Dalam menghadapi konflik antara Rusia dan Ukraina Dewan Keamanan PBB hanya bisa sebagai mediator dikarenakan Rusia yang tergabung dalam keanggotaan Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto, hak veto tersebut yang membuat Rusia dapat menolak keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan
- 2) Dewan Keamanan berperan dalam penyelesaian konflik sengketa secara damai dan sengketa secara paksa dalam konflik antara Negara di dunia termasuk dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, walau pun dewan keamanan terhalang oleh hak veto dari Rusia, dewan keamanan telah berusaha sebisa

⁵ Teuku May Rudy, Refika Aditama, 2011, *Hukum Internasional 2*, Bandung, hlm. 102

⁶ Buah Pelanggaran HAM Dalam Perang Rusia-Ukraina: Suspensi Rusia Dalam Human Rights Council Oleh PBB – HIMHI', Binus.Ac.Id, 2022 [accessed 19 June 2025]. Council on Foreign Relations. 2024. Conflicts to Watch in 2024.

⁷ Piagam PBB

⁸ Harahap, P. P. A., Siagian, S. Z., Simanullang, S. C., Daily, V. G., Lubis, Y. I., & Simbolon, Y. Y. (2023). Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dengan Ukraina. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 1(6), 321-329.

mungkin untuk mencoba menyelesaikan konflik kedua belah pihak

B. SARAN

Saran saya Dewan Keamanan PBB tidak dipebolehkan untuk menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri, tetapi harus mementingkan perdamaian dunia seperti fungsi dan kewajiban dari Dewan Keamanan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu **Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum** sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H**
3. Penasehat Akademik Penulis, Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H**
4. Ketua Bagian Hukum Internasional, Bapak **Ahmad Iffan S.H., M.H**
5. Kepada semua pihak yang sudah membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ambarwati, 2012, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Istanto, Sugeng, 2010, Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya Press, Jakarta.
- Malcolm N.Shaw, 2013, *Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media.
- Narsif, 2007, *Hukum organisasi internasional*, Fakultas Hukum Padang
- Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar*

Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Teuku May Rudy, Refika Aditama, 2011, *Hukum Internasional 2*, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Piagam PBB

Sumber lainnya

- Asep Daenuri, 2021, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina," *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Buah Pelanggaran HAM Dalam Perang Rusia-Ukraina: *Suspensi Rusia Dalam Human Rights Council Oleh PBB – HIMHI*, *Binus.Ac.Id*, 2022 [accessed 19 June 2025]. *Council on Foreign Relations*. 2024. *Conflicts to Watch in 2024*.
- Dirjen Administrasi Hukum Umum Republik Indonesia, 2003, *Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban- Korban Pertikaian- Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II)*.
- Hartana and Lestari Ari Yuni Komang, 2024, "Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Subjek Hukum Organisasi Internasional Dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia." Vol. 01, Nomor 01.
- Harahap, P. P. A., Siagian, S. Z., Simanullang, S. C., Daily, V. G., Lubis, Y. I., & Simbolon, Y. Y. (2023). Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dengan Ukraina. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 1(6), 321-329.

